BAB II

KONDISI POLITIK PADA MASA TRANSISI DI INDONESIA TAHUN 1965-1967

A. Militer Dalam Dunia Politik Di Indonesia Tahun 1965-1967

Perkembangan bangsa Indonesia, tidak terlepas dari perkembangan militer itu sendiri bahkan sebelum pecahnya Revolusi 1945 militer sudah ada dan selalu bermetamarposa dalam perubahanya yang disesuaikan dengan perkembangan politik. Pada masa Kolonial Belanda angkatan bersenjata Indonesia dengan Belanda disebut dengan KNIL (*Koninklijk Nederlands-Indische Leger*)[1] dan pada masa pemerintahan Jepang disebut dengan PETA (Pembela Tanah Air).[2] Setelah PETA dibubarkan, maka Republik Indonesia yang baru saja merdeka, tidak mempunyai pasukan bersenjata untuk mempertahankan diri terhadap musuh luar dan dalam negeri. Oleh Karen itu, para pemuda Indonesia turun tangan untuk mengisi kekosongan itu dengan

---

[1] Koninklijk Nederlands-Indische Leger merupakan tentara kerajaan Hindia Belanda. Pasukan ini terdiri dari serdadu-serdadu pribumi yang dari golongan etnik pilihan korps perwira yang terdiri dari orang belanda dan segelintir orang Indonesia. Pada mulanya di maksudkan untuk memelihara keamanan di dalam negeri. Namun, ketika "Perang Pasifik" mengecam untuk meluas ke Asia Tenggara, KNIL dilatih kembali untuk juga melakukan tugas-tugas pertahanan terhadap musuh dari luar. Ulf Sundhaussen, Hasan Basri. *"Politik Militer Indonesia 1945-1967 : Menuju Dwi Fungsi ABRI", "Road to Power: Indonesia Military Politics 1945-1967"* (Jakarta : Lembaga Penelitian dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).).

[2] Pembela Tanah Air (PETA), Pasuka sukarela untuk membela tanah Jawa dibentuk pada Tanggal 3 Oktober 1943. Ulf Sundhaussen, Hasan Basri. *"Politik Militer Indonesia 1945-1967 : Menuju Dwi Fungsi ABRI", "Road to Power: Indonesia Military Politics 1945-1967".* (Jakarta : Lembaga Penelitian dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)).

cara membentuk organisasi-organisai perjuangan, yang dikenal dengan nama "lasykar"[3], tetapi mereka tidak memiliki senjata, tidak terlatih, tidak berdisiplin, dan tidak memiliki pimpinan yang berpengalaman.[4]

Pada Tanggal 5 Mei Tahun 1947, persiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk membentuk sebuah panitia yang dipimpin langsung oleh persiden Soekarno. Panitia tersebut diberikan nama "Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia" yang beranggotakan 21 orang dari pemimpin pasukan-pasukan bersenjata, termasuk di dalamnya pemimpin-pemimpin beberapa laskar yang berpengaruh kuat terhadap pertahanan bangsa Indonesia. Pada Tanggal 7 Juni Tahun 1947 dikeluarkan sebuah penetapan Presiden yang membentuk suatu organisasi tentara, bernama "Tentara Nasional Indonesia" (TNI) yang dibentuk sebagai

---

[3] Laskar seringkali berselisih paham dengan pemerintah Soekarno dan tidak mau menerima perintah dari pemimpin nasional yang tidak bersikap tegas dalam menentang pendaratan pasukan-pasukan Sekutu dan Belanda, dan yang berusaha menakan semangat mereka untuk bertindak. Laskar-laskar sering kali terlibat dalam bentrokan kekerasan satu sama lain karena persoalan idiologi atau dalam usaha mereka untuk memiliki senjata. Disiplin dari beberapa lascar itu begitu rendahnya sehingga penduduk sering takut akan tingkahlaku dan tindakan mereka yang sewenang-wenang. Dalam keadaan seperti itu maka penegakan hokum dan kewibawaan pemerintah sulit untuk dilaksanakan. Karena mereka pada umumnya masih didefinisikan dengan kolonioal dan pendudukan. Pemerintah akhirnya hanya membentuk sebuah Badan Penolong Keluarga Kurban Perang (BPKKP) yang salah satu bagiannya bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR), pada Tanggal 22 Agustus 1945. BPKKP itu sendiri dari tiga bagian, yakni: Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pengumuman pembentukan BKR sendiri dikeluarkan oleh PPKI. PPKI sendiri kemudian berubah menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai sebuah badan pembentukan pemerintah dan kemudian berubah fungsi menjadi badan legislati. BKR yang menjadi wadah dalam mempertahankan kemardekaan ternyata tidak efektif dalam melakukan koordinasi di setiap daerah, pembentukan ini seolah hanya ingin menyenangkan hati para pemuda yang berapi-api. Ulf Sundhaussen, "Politik Militer Indonesia 1945-1967",.p,. 11-19 dan Mestika Zed, Hasril Chanuago, *"Perlawanan Seorang Pejuang; Biografi Kolinel Ahmad Husein",* (Jakarta : Pustaka SinarHarapan, 2001). p.36-42

[4] Ulf Sundhaussen, "Politik Militer Indonesia 1945-1967". .p 10

penyempurnaan dari TRI (Tentara Rakyat Indonesia). Dalam penetapan itu diputuskan bahwa mulai Tanggal 3 Juni Tahun 1947, telah resmi berdiri TNI dan angkatan perang, serta anggota laskar yang bersenjata, baik yang sudah bergabung atau tidak bergabung dalam biro perjuangan dimasukan ke dalam TNI.

Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945 militer dianggap sebagai yang paling berjasa dalam peristiwa tersebut, dengan mengangap bahwa mereka terlahir bukan dari sistem politik maupun pemerintahan yang pada saat itu berkuasa, melainkan terlahir dari hirup pikuk situasi revolusi yang membuat mereka merasa bertanggung jawab dan lebih-lebih merekalah yang paling berjasa dengan kemardekaan, maka mereka lebih tunduk secara langsung kepada bangsa dan negara dari pada harus patuh terhadap politisi yang sedang berkuasa.[5]

Supermasi sipil dibangun dengan sebuah budaya politik yang baik. Budaya politik adalah suatu parameter dimana peran sipil sangat dominan dalam sebuah negara. Budaya politik yang baik dapat diwujudkan ketika mesin politik (partai) dapat menyentuh akar rumput dan melakukan kaderisasi politik yang baik. Pada masa pergerakan nasional di Indonesia, tidak terdapat partai politik yang mengakar dan memberikan budaya politik yang baik kepada masyarakat. Partai-partai politik yang ada pada saat itu

[5] Sundhaussen, Polotik Militer …, p.13

antara lain: Partai Serikat Islam, Partai Sosialis Indonesia dan Partai Nasional Mahasiswa (PNI).

Partai Serikat Islam merupakan partai yang memiliki massa yang sanggat besar saat itu. Akan tetapi, banyaknya anggota partai tersebut tidak diimbangi dengan internalisasi budaya politik yang baik ke seluruh anggotanya. Banyaknya anggota partai itu dikarenakan variable lainnya yang berpengaruh seperti ikatan keagamaan maupun ketokohan pimpinannya terutama Hadji Oemar Said Tjokoroaminoto. Partai-partai politik lainnya juga kurang memiliki budaya politik yang baik. Partai Sosialis Indonesia pimpinan Sjahrir memang dikenal sebagai partai kalangan intelektual. Namun, citra partai itu tidak menjadikan budaya politik partai itu dikatakan baik karna intelektual para peminpin partainya tidak diiringi dengan budaya politik yang baik sehingga terbukti bahwa partai ini hanya memiliki kader-kader berkualitas di tingkat pimpinannya tetapi tidak memiliki sentuhan politik di lapisan akar rumput.

Lintasan sejarah militer memberikan suatu analisis tentang masuknya "militer"[6] dalam dunia perpolitikan Indonesia. Faktor dominan masuknya

---

[6] Militer sebagai sebuah organisasi pertahanan, mutlak di perlukan oleh setiap Negara yang ingin aman dari ancaman-ancaman yang dapat mengganggu eksistensi Negara tersebut. Urgensi akan organisasi militer tersebut bagi Negara yang baru merdeka dari kolonialisme adalah untuk mempertahankan dari ancaman kembalinya bangsa kolonial. Sebagai kalangan yang merasa ikut berperan dalam proses pencapaian kemerdekaan di Indonesia, militer memang tidak dapat dipungkiri, waloupun bentuknya belum seperti saat ini. Sehingga tuntutan untuk terlibat dalam perpolitikanpun harus dipertimbangkan. Beberapa *maneuver* yang dilakukan militer untuk ke tujuan itupun terekam dalam sejarah, diantaranya pada "Peristiwa 17 Oktober", dan tidak adapat dilupakan dan juga merupakan awal dari

militer dalam dunia perpolitikan adalah budaya politik yang kurang dibangun dengan baik oleh partai-partai politik. Ketidak mampuan kalangan sipil dalam mengurus negara membuat kalangan militer berinisiatif untuk masuk *(intervensi)* ke dunia perpolitikan. Masuknya militer dalam dunia perpolitikan Indonesia disebut dengan *Pretorian.*[7]

Weber dengan teorinya mengatakan bahwa pretorianisme didefinisikan sebagai dominasi *honoratiores* (orang-orang terhormat, ningrat). Adalah satu jenis kekuasan yang diterapkan pada kelompok *manorial* (kesatria) atau kelompok *patrimonial* (suatu unit yang lebih maju dari rumah tangga *patriarch,*[8] yang merupakan unit yang relatif kecil yang didasarkan atas ikatan darah). Di dalam sistem *patriarch*, staf penguasa diambil hanya untuk menjamin kepatuhan pemerintah, sedangkan hubungan-hubungannya didasarkan atas kepemimpinan feodal, birokrasi atau hanya yang bersifat pribadi.[9]

---

sejarah dominasi militer bagsa ini adalah padaperistiwa "Gerakan 30 September 1965 sampai Supersemar". Dimana militer mengambil alih tandu kekuasaan demi keselamatan Negara. Skripsi Hadi Nafis Kamil, *"Militer dan Kekuatan Politik: Studi Tentang Keterlibatan TNI dalam Perpolitikan Nasional Era 1995-1998,* (Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah. Jakarta 1430H/2009M.

[7] Praetorian adalah situasi dalam masyarakat yang kalangan militernya dominan sebagai aktor politik. Dari kata praetorianism, yang mengacu pada situasi dimana golongan militer memiliki kekuasaan politik yang independen karena kemanapun untuk mengancam atau menggunakan kekuatan militernya. Konsep itu berasal dari zaman kekaisaran Romawi, abad 2 BC abad 3 AD. Praetorian adalah anggota praetorian guard (pasukan pengawal kaisar) yang mempunyai potensi membuat kekuasaan.

[8] Sistem Patriach adalah Sistem menurut keturunan Bapak.

[9] Amos Perlumutter, *Militer dan Politik,* (Jakarta : CV Rajawali, 1984), p.134

Militer Indonesia tetap semangat untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia walaupun dengan para perwira militer yang berjumlah sedikit dan memilih lapangan politik sebagai pekerjaannya. Namun profesi militer dapat bertindak sebagai suatu landasan politik. Semakin tinggi kedudukan perwira maka semakin bersifat politis, terutama pada situasi-situasi praetorian dan revolusioner yang mungkin melibatkan seluruh organisasi militer dalam aksi politik. Dalam situasi politik yang stabil sedikit perwira yang bersedia menggantikan profesi mereka dengan politik. Akan tetapi, peranan kelompok kecil yang berbuat demikian itu sangat vital terhadap setiap penjajakan hubungan sipil militer dengan peranan militer negara.[10]

Sudah menjadi pengetahuan umum, militer di Indonesia yang menjelma dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)-kini Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) adalah satu komponen negara yang memiliki nilai politis dan strategis. Meskipun senantiasa menampilkan citra solid dan independen, namun bukan rahasia lagi dalam tubuh lembaga militer tersebut hubungan di antara berbagai kelompok kepentingan di dalamnya tidak selalu berjalan harmonis. Satu-satunya momentum yang tercipta bagi Indonesia terjadi pada “Tahun

[10]Perlumutter, Militer dan …, p.135

1965, ketika kudeta militer menurunkan Soekarno".[11] Namun kesempatan itu tidak memberikan peluang bagi lahirnya demokratisasi, karena militer tidak memberikan ruang kepada sipil untuk mengkonstruksikan perubahan keDemokrasi. Militer malah mengambil alih kepeminpinan sipil dengan menggelar sidang parlemen (MPRS) Tahun 1968 yang memberikan legitimasi kontitusional yuridis terhadap Jendral Soeharto.

Kekuasaan Jendral Soeharto kemudian dikukuhkan dalam pemilu 1972, dimana Golkar sebagai partai politik bentukan militer dan gabungan kekaryaan memenangkan pemilu. Ada beberapa yang mendorong militer secara aktif masuk ke dalam arena politik dan memainkan peranan politik. Faktor-faktor ini lebih terletak pada kehidupan politik atau sistem politik, bukan pada militer dan dikelompokkan menjadi tiga. Yaitu: *pertama* : adanya ketidak stabilan sistem politik. Keadaan seperti ini akan menyebabkan terbukanya kesempatan dan peluang yang besar unutk menggunakan kekerasan didalam kehidupan politik. Sistem politik ini pula yang paling sering mengakibatkan timbulnya hal-hal yang mendiskreditkan pemerintahan sipil. Termasuk didalam hal itu ada tidaknya pola-pola legitimasi yang secara umum diterima dalam masyarakat yang menyangkut jalannya lembaga-lembaga sipil dan pemerintahan. *Kedua :* Yang

---

[11] Mahasiswa yang tergambung dalam kesatuan aksi mahasiswa Indonesia (KAMI) yang diboncengi ABRI makin keras menyuarakan hujatan terhadap Soekarno dan kroninya, sepanjang jalan membawa poster-poster yang berisi kecaman-kecaman terhadap pribadi Soekarno bukan saja menentang kebijaksanaannya, tapi juga menyerang pribadi dengan meneriakan dan membawa sepanduk-sepanduk: "Sukarnao Gestapu Agung" atau "Mahmilubkan Bung Koarno", ada jyga sepanduk bertuliskan, "Ganyang Bandot agung, Adili Soekarno, Turunkan Soekarno, dan sebagainya. Reni Nuryanti, *"Tragedi* Soekarno: dari Kudeta sampai Kematiannya", (Yogyakarta: Ombak 2008) Cet-1,.p,.30-31.

bertalian dengan kemampuan golongan militer untuk mempengaruhi atmosfir kehidupan politik, bahkan untuk memperoleh peranan-peranan politik yang menentukan, yang menarik dalam kaitan ini adalah bahwa dalam beberapa hal dominasi militer di dalam politik justru "diundang" atau dipermudah oleh golongan sipil biasanya terjadi sewaktu kepeminpinan sipil mengambil keputusan untuk memperbesar jumlah personil angkatan bersenjatanya atau meningkatkan persenjatan militer karena diperlukan untuk menghadapi musuh.[12]

B. Pembersihan Berdarah Anti Komunis

Miriam Budiardjo sebagai ahli politik mengemukakan bahwa masa Demokrasi Terpimpin itu ditandai dengan meluasnya pengaruh Partai Komunis Indonesia di segala lapisan masyarakat dan pemerintahan.[13] Hal itu semua tidak lepas dari peran Soekarno yang memberikan kemudahan-kemudahan pada PKI untuk mengekspresikan segala aktivitas politiknya, disaat partai-partai politik lainnya tengah mengalami masa "pengkebirian", sehingga terkesan bahwa masa Demokrasi Terpimpin, PKI di anak emaskan oleh Soekarno.

Ada analisis lain mengenai kedekatan Soekarno dengan PKI yang menyatakan bahwa Soekarno bukanlah seorang komunis, tetapi yang lebih

---

[12] Yahya A Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik Indonesia 1945-1966,* (Yoyakarta: Gajah Mada University Press, 1982), p2.

[13] Miriam, Budiardjo, *"Dasar-Dasar Ilmu Politik",* (Jakarta : PT Gramedia1989),.P,.71

tepat adalah bahwa Soekarno bergantung pada PKI di dalam usaha mempertahankan posisinya menghadapi militer yang muncul sebagai kekuatan politik yang setara. Ada tiga faktor yang berperan mengapa Soekarno menggandeng PKI, *Pertama*; Berdasarkan hasil pemilu 1955 PKI merupakan partai terbesar yang mendapatkan kursi-kursi di daerah-daerah Jawa, *Kedua*; PKI mempunyai kelengkapan keorganisasian yang paling luas dan cermat di kalangan penduduk pedesaan dan kelas bawah perkotaan, *Ketiga*; PKI paling mampu mengerahkan massanya ke rapat-rapat umum tempat Soekarno berbicara[14] disamping itu secara *personal* antara Soekarno dan PKI mempunyai keterikatan ideologis yang sama, berangkat dari fakta bahwa Soekarno juga sangat dipengaruhi oleh Marxisme bahkan Soekarno di berbagai kesempatan berkali-kali mengatakan bahwa ia seorang Marxis, terhadap ajarannya sendiri (Marhaenis) Soekarno berkali-kali mengatakan:

> *Bahwa orang tidak akan mengerti Marhaenisme, jikalau ia tidak mempelajari dan mengerti Marxisme.*[15]
> *Dus, orang yang menamakan dirinya Marhaenis, tetapi tidak menjalankan Marxisme di Indonesia, apakah dia Marhaenis atau tidak ? Saya bilang tidak ! Orang yang demikian itu Marhaenis gadungan!.*[16]

Pemahaman di atas bahwa "Marxisme"[17] adalah alat perlawanan dan

---

[14] Nurani Soyomukti, *"Soekarno Otoriter*" (Yogyakarta : Garasi 2010),.P,.145-146

[15] Abdulgani, Roeslan, "*Sosialisme Indonesia*". (Jakarta : Prapantja, 1965),.P,. 37

[16] Notosusanto, Nugroho *"Metodologi Sejarah"*, (Jakarta: Yayasan Obor 1985),.P,.*7*

[17] Marxisme adalah sebuah partai sosialis yang berkembang di negeri kincir angin dan sejumlah pemimimpin Indonesia telah bersentuhan dengan partai tersebut. Partai ini tertarik pada persoalan rakyat Indonesia serta mementang perluasan kekuasaan Belanda dengan cara kekerasan di Hindia Belanda, partai tersebut adalah Partai Pekerja Sosial

sekaligus ideologi yang sesuai dengan pribadi Soekarno. Maka tidak memandang komunis sebagai musuh atau ancaman yang harus disingkirkan sebagaimana tokoh-tokoh lain memandang komunisme dan PKI. Bahkan Soekarno selalu berusaha membela PKI, salah satunya meminta tentara agar menurunkan pembatasan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan PKI.[18]

Pada Tanggal 15 Agustus Tahun 1951 Perdana Menteri Sukiman menggelar razia massal terhadap orang-orang komunis. Razia pertama menahan 16 anggota parlemen PKI, 6 orang pegawai tinggi kementerian perburuhan dan seorang editor surat kabar yang pro PKI ditangkap. Selama rentang bulan Agustus-November tidak kurang dari 2000 orang-orang PKI ditahan.[19]

Pada Tahun 1955 atau delapan Tahun paska konflik berdarah di

Demokrasi atau SDAP yang di dirikan di Amsterdam pada Tahun 1894. Marxisme diperkenalkan secara ressmi ke Indonesia pada Tahun 1914 bersamaan dengan berdirinya ISDV *(Indische Social Democratische Vereeninging)* atau Serikat Sosial Demokrasi Hindia Belanda, para pendiri adalah sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh Hendricus Josephus Francicus Marie Sneevlite dating ke Jawa pada Tahun 1913 dan bekerja sebagai pemimpin redaksi harian *Soerabajacash Handelsblad*, selama dua bulan dan kemudian menjabat menjadi sekertaris *Semarangse Handelsvereniging*, ia juga bergabung dengan VSTP dengan pimpinan Sneevliet, yang merupakan organisasi buru terbesar pertama di Indonesia menjadi radikal. Untuk mendapat pengikut di kalangan bumiputra, Sneevliet mengembangkan suatu metode *Infalitrasi* baru, yaitu teknik *blac within* dengan keanggotaan partai. ISDv mengusahakan hubungan dengan Serikat Islam yang pada waktu itu berkembang pesat sebagai pergerakan bangsa Indonesia. Banyak anggota ISDV menyelundup kedalam tubuh SI sebaliknya, aktivis-aktivis SI juga menjadi anggota ISDV. Di Hindia Belanda di bentuk Persatuan Perherakan Kemerdekaan Rakyat, yang terdiri dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Serikat Islam (SI). Dadang Wahansa S, Soekarno, *"Marxisme & Leninsme : Akar Pemikiran Kiri & Revolusi Indonesia",* (Depok : Komunitas Bambu, 2014),.p,.5-10. Dan M. Alfan Alfian, "*HMI 1963-1966 Menegakan Pancasila di Tengah Prahara",* (Jakarta; PT. Kompas Media Nusantara 2013), Cet-1,.p,.45-50.

[18] Nurani Soyomukti, *"Soekarno Otoriter*". 2010,.P,.147.

[19] Subhan, Sd, *"Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955",* (Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya 1996),.P,.31-32

Madiun, DN Aidit menyanggah Persitiwa Madiun sebagai bentuk *subversive* PKI terhadap negara dan balik menuduh bahwa Peristiwa Madiun adalah bagian dari provokasi politik Partai Masyumi yang bertujuan ingin menghabisi kaum komunis, yaitu lewat mengarahkan PKI pada konflik berdarah dan setelah itu direaksi dengan pengejaran dan pembunuhan anggota dan simpatisannya.[20]

Gerakan 30 September atau GESTAPU merupakan gerakan yang ditunjukan untuk melawan Partai Komunis di Indonesia, peristiwa tersebut bermula pada penculikan keenam Jendral dari rumah mereka masing-masing oleh sekelompok kecil Tentara Angkatan Darat, keenam Jendral tersebut adalah Letnan Jendral Ahmad Yani, Jendral Suprapto, Mayor Jendral S.Parman, Mayor Jendral M.T.Haryono, Brigadir Jendral D.I.Pandjaitan dan Brigadir Jendral Sutojo Siswomiharjo. Dalam penculikan keenam Jendral tersebut tiga orang dibunuh dengan peluru yaitu, Ahmad Yani, Haryono dan Pandjaitan. Sedangkan ketiga lainnya dibawa dalam keadaan hidup. Jendral yang berhasil meloloskan diri dari sergapan tersebut adalah Jendral Nasution, akan tetapi anak perempuannya yang berusia lima Tahun terbunuh. Keenam Jendral tersebut dibunuh dan dimasukan kedalam lubang buaya di wilayah dekat Pangkalan Udara Halim Jakarta.[21]

Pada Tahun 1965 terjadi peristiwa berdarah yang diakibatkan oleh

---

[20] Adidit, 2005: 152

[21] Peter Kasenda, Soekarno dan Marxisme dan Leninisme, (Depok, Komunitas Bambu, 2014). P. 189-193.

PKI, di kenal dengan sebutan G30S PKI. Pada peristiwa tersebut banyak terjadi pembunuhan diberbagai daerah terutama di daerah Pulau Jawa. Pembersihan dimulai pada Oktober 1965 di Jakarta, yang selanjutnya menyebar ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Pembantaian dalam skala kecil dilancarkan di sebagian daerah di pulau-pulau lainnya, terutama Sumatra. Pembantaian terburuk meletus di Jawa Tengah dan Timur. Korban jiwa juga dilaporkan berjatuhan di Sumatra utara dan Bali. Petinggi-petinggi PKI diburu dan ditangkap: petinggi PKI, Njoto, ditembak pada Tanggal 6 November 1965, ketua PKI Dipa Nusantara Aidit pada 22 November 1965 dan Wakil Ketua PKI M.H. Lukman segera sesudahnya. Pada bulan Desember Tahun 1965. Pembantaian terjadi di Bali, Aceh dan Sumatra. Pemberontakan kedaerahan pada akhir 1950-an semakin memperumit peristiwa di Sumatra karena banyak mantan pemberontak yang dipaksa untuk berafiliasi dengan organisasi-organisasi komunis untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada Republik Indonesia.[22]

Setelah peristiwa G30S PKI kebencian masyarakat terhadap PKI ditandai dengan peristiwa pembersihan orang-orang yang diduga terlibat dalam PKI. Hal itu seperti yang dilakukan oleh PII (Pelajar Islam Indonesia), KAMMI dan organisasi lainnya yang terjadi pada Tahun 1966.[23] Pada akhir Tahun 1996 sampai pertengahan Tahun 1966 terjadi banyak pembunuhan

[22] Salim Haji Said, *GESTAPU 65 –PKI, AIDIT, SOEKARNO, DAN SOEHAR*, (Bandung, Mizan Media Utama (MMU); 2015), p. 137-139.

[23] PII 266

diberbagai daerah di Indonesia, seperti di Bali, Sumatra, Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta di berbagai daerah Indonesia lainnya lebih dari 100.000 orang dibantai oleh Angkatan Darat dan Milisi yang berafiliasi dengan Angkatan Darat untuk pembersihan PKI.[24]

C. Runtuhnya Demokrasi Terpimpin

Kekuatan politik adalah segala sesuatu yang berperan dan pengaruh di dalam dunia perpolitikan Indonesia. Kekuatan politik dapat juga dikatakan sebagai segala sesuatu yang terlibat secara aktif dalam kekuatan politik tertentu. Kekuatan politik terbagi menjadi dua, kekuatan politik yang terorganisir dan yang tidak terorganisir. Kumpulan dari orang-orang yang peduli pada isu-isu yang ada, maupun yang berideologi atau persepsi sama kemudian saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain, sehingga menghasilkan suatu keputusan bersama.

Kekuatan politik sangat berperan di dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Banyak kekuatan politik di Indonesia, namun yang benar-benar berpengaruh dan menonjol hanya beberapa saja. Kekutan-kekutan politik tersebut adalah TNI atau ABRI, POLRI, Organisasi Kecendekiaan, Lembaga-lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers, Organisasi Penelitian, kekuatan politik yang tersebar di daerah-daerah, kelompok

[24] Kasenda, Soekarno dan Marxisme …, p. 216.

kemasyarakatan yang berbasis pada Agama (NU, Muhammadiyah, dll), Buruh dan Pekerja, Mahasiswa, Partai-partai politik[25]. Kekuatan politik Indonesia dapat berupa institusi maupun individu. Dalam perkembangan selanjutnya, kekuatan politik pada waktu itu terpusat kepada presiden Soekarno dengan TNI AD dan PKI disampingnya.[26]

Semua kekuatan politik yang ada dikuasai atau dimonopoli dengan baik seperti apa yang terjadi pada era Orde Baru pimpinan Soeharto.[27] Setelah 32 Tahun lamanya Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, rezimnya akhirnya runtuh karena kehilangan kuasa atas hal-hal penting yang menjadi penopang pemerintahan. Moh. Hata meninggalkan Soekarno sejak 31 Desember 1956,[28] dilanjut kabinet pemerintahan terpecah belah, DPR menarik dukungannya bahkan sampai meminta Soekarno mengundurkan diri, pengusaha-pengusaha sewasta yang menjadi penopang modal menjadi tidak tertarik dengan usaha-usaha lokal, bahkan semakin banyak yang menanamkan modal di Luar Negeri. Selain itu militer sedang dihadapkan dengan konflik internal sehingga menjadi terpecah belah. Karena itulah kekuatan-kekuatan politik tersebut harus benar-benar diperhatikan

---

[25] Effendy, Bahtiar *"Teologi Brau Politik Islam"*, (Yogyakarta, Galang Press Universitas),.p,.202

[26] Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho Natosusanto, *"Sejaran Nasional Indonesia VI ; Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia (±1942-1998)",* (Jakarta : Balai Pustaka, 2008) Cet-2,.p,.425

[27] Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho Natosusanto, *"Sejaran Nasional Indonesia VI ; Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia (±1942-1998)",p,.425*

[28] Reni Nuryanti, *"Tragedi Soekarno : Dari Kudeta Sampai Kematiannya",* (Yogyakarta : Ombak, 2002)Cet-1,.p,.6--7

dalam membentuk pemerintahan, bukan berarti harus dimonopoli namun lebih tepat dikatakan harus diselaraskan agar dapat membangun pemerintahan menuju keutuhan dan keselarasan.

PKI adalah penyebab awal runtuhnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinan Soekarno. Setelah G30S PKI berakhir kebencian telah tertanam dalam hati masyarakat. Pada Tahun 1965 terjadi pergolakan politik serta kerusuhan bahkan pembantaian yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang memberikan kesan negative terhadap pemerintahan, yang berakibat pada Tahun 1965 perekonomian telah sampai pada keadaan yang dimana menuntut penuh perhatian pemerintah. Produksi sangat merosot disemua bidang kecuali dalam bidang perminyakan. Jaringan komunikasi mendekati keambrukan dengan jalan raya dan kereta api dalam keadaan terlantar, dan pelabuhan penuh dengan lumpur karena tidak terawat. Di berbagai tempat terutama diluar Jawa, penyediaan listrik sudah terbatas. Di bidang kebijaksanaan fiscal, uang yang beredar sudah meningkat lima kali menjadi Rp.2.982,4 miliar. Pada Tanggal Desember 1995 rupiah di devaluasikan sehingga Rp.1.000 menjadi Rp.1, dengan disertai pajak penukaran 10 persen. Selain itu pemerintah memiliki hutang kepada bank

luar negeri mencapai 2.175 juta US Dolar Amerika dan diantaranya 530 juta dolar Amerika dilunasi Tahun 1966. [29]

Karena pemerintahan di Indonesia sedang mengalami keadaan terpuruk, maka pemerintah telah menaikan harga-harga bahan pangan sehingga mendorong inflasi lebih lanjut. Pada Tanggal 22 November 1965 harga bensin dinaikkan dari Rp.4 perliter menjadi Rp.250 sehingga tarif angkuttan naik dengan 30 persen. Serangkaian kenaikan harga diumumkan pemerintah pada Tangal 3 Januari Tahun 1966 hingga bensin kembali dinaikan dari Rp.250 menjadi Rp.1000 dan harga minyak tanah melonjak dari Rp.150 perliter menjadi Rp.400 perliter. Karena kenaikan harga itu menyebabkan reaksi yang keras dari pihak yaitu kekuatan politik baru, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Front KAMI terdiri dari Organisasi mahasiswa yang berafiliasi dari Partai Islam, PSI, Partai Katolik, IPKI, dan PII, yang dibentuk pada Tanggal 25 Oktober Tahun 1965 di bawah naungan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.[30]

Dalam keterangan lanjut, pemerintah hanya menafsir 87.000 orang sebagaimana dilaporkan Soekarno pada Tanggal 15 Januari Tahun 1966. Kerusuhan dan pembunuhan orang-orang yang tidak berdosa inilah membuat Soekarno geram. Soekarno marah dengan bangsanya sendiri, marah karena

---

[29] Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967* Menuju Dwi Fungsi ABRI, (Jakarta, LP3S : 1986).P.395-396.

[30] Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967* Menuju Dwi Fungsi ABRI, (Jakarta, LP3S : 1986).P.396.

tidak mau lagi mengindahkan kata-katanya. Dalam suasana inilah Soekarno merasa kembali telah *didzolimi*. Disisi lain, mahasiswa yang tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang diboncengi ABRI makin keras menyuarakan hujatan terhadap Soekarno dan Kroninya. Sepanjang jalan, mereka membawa poster-poster yang berisi kecaman terhadap pribadi Soekarno.[31]

Dalam pada itu, demontrasi makin meningkat, bukan saja untuk menentang kebijaksaannya, tetepi juga menyerang pribadi dengan antara lain meneriakkan dan membawa spanduk-spanduk: "*Soekarno Gestapu Agung"*ataua "*Mahmilubkan Bung Karno".* Ada juga spanduk bertulis, *"goyang bandot Agung, adili Soekarno, turunkan Soekarno"*, dan sebagainya, demikian kata Solichin Salam.

Dikabarkan bahwa Koran-koran Ibukota edisi pagi, Tanggal 19 Maret Tahun 1966 memberitakan kebulatan tekad partai politik dan organisasi masa untuk tidak membenarkan cara-cara yang digunakan para pelajar, Mahasiswa, dan pemuda yang membahayakan revolusi Indonesia dan merongrong kewibawaan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Bahkan pannglima KKO, Jendral Hartono, terus melakukan pembelaan terhadap Bung Karno dengan mengucapkan kalimat yang cukup melekat dalam memori rakyat, "*hitam kata Bung Karno, Hitam kata KKO; putih kata Bung Karno, Putih*

[31] Sundhaussen, *Politik Militer* …, p.395

kata KKO". Jenderal Hartono terus member peringatan pada para demonstran agar berhenti menghina dan melecehkan Soekarno. Peringatan itu merupakan ultimatum kedua setelah pemerintah secara resmi membubarkan KAMI pada Tanggal 15 Februari Tahun 1966. Kenyataannya, perlakuan pemerintah ternyata tidak membuat Mahasiswa jera, suasana hati mereka tetap memanas, gelora semangat untuk menggulingkan Soekarno tiada padam.

Pada Tanggal 11 Maret Tahun 1966 mereka kembali melancarkan aksi dengan mendatangi Istana Negara. Tujuan utama mereka adalah menggagalkan sidang kabinet Dwikora yang akan dilangsungkan siang itu. Mereka berdemo diluar Istana, menuntut agar sidang digagalkan karena menurut mereka Soekarno sudah tidak lagi berhak menjadi pemimpin. Aksi mahasiswa KAMI dengan tiga tuntutan yang disebut dengan TRITURA (Tiga Tuntutan Rakyat), yang berisi bubarkan PKI, turunkan harga dan rombak kabinet.[32]

Pada sidang Umum MPRS Tahun 1966, Presiden selaku mandataris MPRS diminta oleh MPRS untuk memeberikan peratanggung jawaban mengenai kebijakan yang telah dilakukan, khususnya mengenai masalah pemberontakan G30S PKI. Hal yang mengecewakan MPRS adalah bahwa presiden Soekarno dalam pidato pertanggungjawabannya terhadap MPRS cenderung memberikan amanat sebagaimana biasa ia lakukan dihadapan

[32] Reni Nurhayati. *Tragedi Soekarno, dari kudeta sampau kematiannya* (Jogjakarta: Ombak, 2008), p. 30-31.

sidang-sidang lembaga yang berada dalam lingkungan pertaanggungjawabannya. Presiden menamai pidatonya itu *Nawaksara*, artinya sembilan pokok masalah. Masalah G30S PKI merupakan masalah Nasional yang menyangkut kebijakan Presiden tidak disinggung dalam *Nawaksara*. Pimpinan MPRS meminta kelengkapan laporan pertanggungjawabanya sebagai Mandataris MPRS agar Presiden melengkapi pertanggungjawabanya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa G30S PKI beserta epilognya dan kemunduran ekonomi serta akhlak.[33]

Pada Tanggal 23 Februari Tahun 1967 bertempat di Istana Negara dengan disaksikan oleh ketua Presidium Kabinet Ampera dan para menteri, Presiden / Mandataris MPRS / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan resmi menyatakan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban ketetapan MPRS No.1X/MPRS/1966 Jenderal Soeharto. Isi pengumuman itu adalah sebagai berikut.

Pengumuman Presiden

Kami Presiden Republik Indonesia / Mandataris MPRS / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setelah menyadari bahwa konflik politik yang terjadi dewasa ini perlu segera diakhiri demi keselamatan rakyat, bangsa, dan negara.

1. Kami Presiden Republik Indonesia / Mandataris MPRS / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terhitung memulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pengemban

[33] Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6* (Jakarta : Balai Pustaka, 2008),p.558-559

ketetapan MPRS No.1X/MPRS/1966 Jenderal Soeharto dengan tidak mengurangi maksud dan jiwa Undang-undang Dasar 1945.

2. Pengemban ketetapan MPRS No.1X/MPRS/1966 melaporkan pelaksanaan penyerahan tersebut kepada Presiden setiap waktu dirasa perlu.
3. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, para pemimpin masyarakat, segenap aparatur pemerintahan dan selluruh ABRI untuk terus meningkatkan persatuan dan menjaga dan menegakan revolusi dan membantu sepenuhnnya pelaksanaan tugas pengemban ketetapan MPRS No.1X/MPRS/1966 seperti tersebut diatas.
4. Menyampaikan dengan rasa penuh tanggung jawab pengumuman ini kepada rakyat dan MPRS. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi rakyat Indonesia dalam melaksanakan cita-citanya mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Jakarta, 20 Februari 1967.

Presiden / Mandataris MPRS / Panglima Tertinggi

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Soekarno.[34]

[34]Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6* (Jakarta : Balai Pustaka, 2008),p.561-562